



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Empiris di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono Kabupaten Nias Selatan)

Vinsensia Ratna Laia, Arthur Simanjuntak, Tri Darma Sipayung

Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juli 2022

Disetujui Agustus 2022

Dipublikasikan Oktober 2022

Keywords:

Apparatus competenc;
community participation;
use of information
technology;
organizational
commitment;
accountability of village
fund management.

Abstract

This study aims to determine the effect of apparatus competence, community participation, use of information technology, and village government organizational commitment to the accountability of Village Fund management in Simandraolo Village and Hilinamazihono Village. This type of research is quantitative with a causal associative approach. This research was conducted in Simandraolo and Hilinamazihono villages in South Nias Regency. The population and sample in this study were 31 people where in Simandraolo village there were 14 people and Hilinamazihono village were 17 people. This study uses primary data obtained by using a questionnaire. While the data analysis method used in this study is multiple linear regression analysis method which was carried out with the help of SPSS 25 software. The results of this study indicate that the Apparatus Competence and Organizational Commitment of the Village Government have a positive and significant influence on the accountability of village fund management while Community Participation and Utilization information technology has no influence on the accountability of village fund management. However, it can be seen that simultaneously all independent variables in this study have a significant influence on the Accountability of Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Menegakkan otonomi masyarakat adalah salah satu dari peluang bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah menjadikan pemerintah lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing agar memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang lebih besar terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan. Saat ini kebijakan yang ada masih

fokus pada otonomi tingkat kabupaten/kota, namun pada hakikatnya kemandirian ini harus berasal dari pemerintahan tingkat terendah yaitu desa.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit (Rosalinda, 2014). Dengan demikian sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia (Sofiyanto, et. al., 2016).

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Prabawa (2016) pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Dengan demikian wujud dari pembangunan yang dilaksanakan harus dapat benar-benar mencapai sasarannya. Untuk mencapai sasaran tersebut, khususnya pembangunan di wilayah desa, maka pemerintah dengan segenap kemampuannya diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khusus bagi desa dan kelurahan, adalah yang dikenal dengan dana pembangunan desa.

Sedangkan definisi Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut: Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Implementasi Undang-Undang Desa telah menjadi bahan perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa tempat penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa diatur dengan Undang-Undang Desa memotivasi kepala desa untuk melakukannya. Berbagai alasan dan faktor yang disampaikan oleh masyarakat melalui kesediaan kepala desa dan perangkat desa aparat desa dan infrastruktur dan kepemimpinan kepala desa.

Menurut Romantis (2015) bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah untuk memberikan stimulus pembiayaan program pemerintah serta pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong pada masyarakat.

Fenomena menarik terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara terkait pengelolaan dana desa, khususnya dana desa. Di bawah ini adalah rincian dana desa yang dimiliki oleh desa di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono

Desa	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Target Pencapaian %
Simandraolo	1.072.481.096	1.068.167.135	0,040
Hilinamazihono	776.791.000	771.368.949	0,7

Sumber: Kantor Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono

Dana desa yang masuk di desa Simandraolo dan Hilinamazihono berkisar antara 0,040% hingga 0,7%. Sisa dana desa merupakan sisa anggaran dana desa yang tidak digunakan oleh desa selama periode tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Landasan utama dari teori ini adalah tentang hubungan atau interaksi kerja antara pihak pemberi wewenang atau prinsipal dan pihak penerima wewenang atau agen yaitu manajer, dalam konteks kontrak kerja sama. Hal tersebut timbul karena adanya pembatasan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Ghozali, 2020).

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah rakyat, dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. *Agency theory* berpendapat bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* memungkinkan terjadinya permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019).

Hubungan antara teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/*agent*/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Setiana dan Yuliani, 2017).

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan (Mahsun, dkk 2013).

Kompetensi Aparatur

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (6), kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Kemampuan sebagai keadaan yang harus ada dan dimiliki serta harus diketahui atau dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Kemampuan ini terdiri dari 2 (dua) hal. Pertama, kemampuan teknis atau fungsional dengan istilah lain *hardskills*. Kedua, kompetensi perilaku (*behavioural competencies*) atau juga di kenal sebagai *softskills*.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegiatan tertentu dan kondisi tertentu, yang terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi.

Sedangkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, dan mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, et. al., 2012).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa *hardware*, *software*, dan *useware* dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah suatu data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi.

Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi paling sering didefinisikan sebagai (1) keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi; (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Komitmen organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan tujuan-tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Secara teoretis, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia (Ferina, 2016). Kompetensi merupakan padanan kata mampu, yaitu dapat melaksanakan pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan memahami dengan baik, memiliki terampil dan lain-lain.

Kemampuan sebagai keadaan yang harus ada dan dimiliki serta harus diketahui atau dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar. Kompetensi Aparatur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Aulia, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian Medianti (2018) yang mendefinisikan kompetensi aparatur sebagai aparatur yang memiliki kualitas sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Begitu pula hasil penelitian Mada, et al., (2017); Fajri (2015); dan Ferina, et al., (2016) yang berhasil menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dan Widyatama (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mada, et al., (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, dan mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, et. al., 2012).

Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Kim dan Schachter, 2013). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Makalalag (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2017); dan Aziz (2016) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik, apabila didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Pemanfaatan teknologi informasi ini dapat membantu mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan karena informasi akan dihasilkan secara *realtime*. Aulia (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018); dan Sapartiningsih, et. al., (2018) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan tujuan-tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 2015). Komitmen organisasi keadaan dimana karyawan/pegawai sangat tertarik dengan tujuan, nilai-nilai, dan sasaran organisasi atau lembaganya.

Komitmen pada organisasi artinya bukan hanya sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap memiliki organisasi dan berusaha untuk mengupayakan secara maksimal untuk kepentingan demi tercapai sasaran organisasi (Kusumastuti, 2014). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mada, et. al., (2017) berhasil menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Astini (2019); dan Tarjo (2019) yang dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Perdana (2018) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

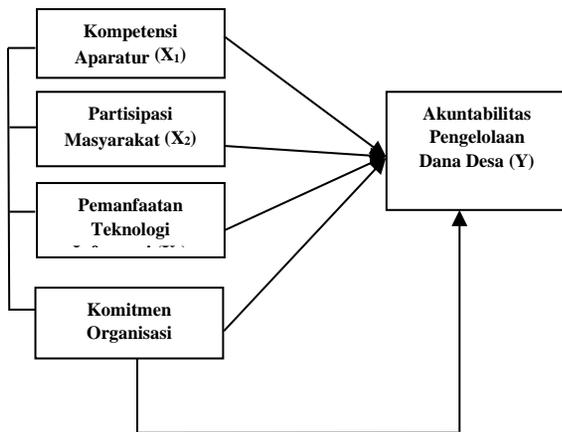
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kuantitatif asosiatif, yaitu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono (2018). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal, yaitu adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, yang terdiri dari variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan desa yang terdapat di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono. Penelitian ini menggunakan data primer,

yaitu data yang langsung diperoleh dari responden dengan cara membagikan kuesioner yang bersumber dari kuesioner penelitian terdahulu.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian. Penjelasan data melalui analisis statistik deskriptif ini diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti.

Uji Validitas

Untuk melihat apakah instrumen tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan tabel dengan *degree of freedom* (df) = n-2.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Ghazali (2018) menyatakan jika nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6, maka kuesioner penelitian bersifat reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur	0,914	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0,934	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,932	Reliabel
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	0,932	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,940	Reliabel

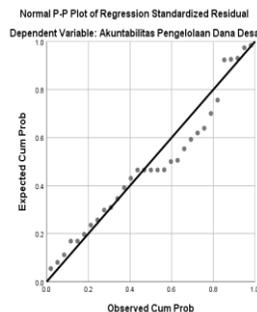
Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha masing- masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asusmsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji grafik yaitu dengan uji grafik yaitu dengan melihat *normal probability plot* pada model penelitian yang dilakukan.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji di atas, bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

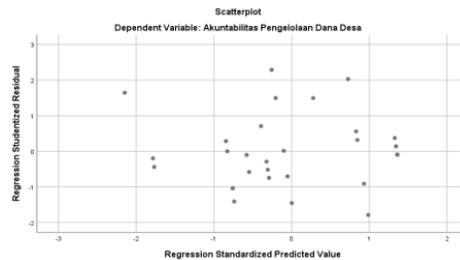
Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
(Constant)			
Kompetensi Aparatur	.548	1.824	
Partisipasi Masyarakat	.208	4.802	
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.177	5.636	
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	.276	3.618	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada interaksi variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi pemerintah desa.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang ada. Pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan bantuan software SPSS 25.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Std. Error			
I(Constant)	-1.157	.428		-2.702	.012
Kompetensi Aparatur	.361	.067	.309	5.406	.000
Partisipasi Masyarakat	.474	.352	.394	1.346	.190
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.304	.379	.254	.802	.430
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	.067	.028	.060	2.368	.026

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$Y = -1,157 + 0,361X_1 + 0,474X_2 + 0,304 X_3 - 0,067X_4$$

- Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- X₁ : Kompetensi Aparatur
- X₂ : Partisipasi Masyarakat
- X₃ : Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X₄ : Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
- A : Bilangan Konstanta
- β_{1,2,3,4} : Bilangan Koefisien

ε : Term of Error

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = -1,157 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sama dengan 1,157.
2. Koefisien $X_1(b_1) = 0,361$ menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Artinya jika kompetensi aparatur ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat.
3. Koefisien $X_2(b_2) = 0,474$ menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Artinya jika partisipasi masyarakat ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat.
4. Koefisien $X_3(b_3) = 0,304$ menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_3) memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Artinya jika pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat.
5. Koefisien $X_4(b_4) = 0,067$ menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi (X_4) memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Artinya jika pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat.

Uji Hipotesis

Uji Statistik F (Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan dana desa) secara simultan.

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	511.163	4	127.791	1392.808	.000 ^b
	Residual	2.386	26	.092		
	Total	513.548	30			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Ini berarti hasil uji F menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen

organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara simultan.

Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1.157	.428		-2.702	.012
Kompetensi Aparatur	.361	.067	.309	5.406	.000
Partisipasi Masyarakat	.474	.352	.394	1.346	.190
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.304	.379	.254	.802	.430
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	.067	.028	.060	2.368	.026

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil Pengolahan Data

1. Tingkat signifikansi untuk kompetensi aparatur adalah sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,361. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Tingkat signifikansi untuk partisipasi masyarakat adalah sebesar 0.190 yang lebih besar dari 0.05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,474. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Tingkat signifikansi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 0,430 yang lebih besar dari 0.05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,304. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Tingkat signifikansi untuk variabel komitmen organisasi pemerintah desa adalah sebesar 0,026 yang lebih kecil dari 0.05 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,067. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinan bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Diketahui range nilainya antar 0-1, apabila nilai *Adjusted R²* kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila *Adjusted*

R² besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.998 ^a	.995	.995	.303

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan tabel di atas besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0.995 atau 99,5%. Variabel independen yaitu kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi pemerintah desa mampu menjelaskan atau menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sisanya sebesar 0,05 dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono.
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono.
4. Komitmen organisasi pemerintah desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono.
5. Kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi pemerintah desa secara simultan dan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono.

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti menggunakan variabel lain yang diyakini dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa di desa lain. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambahkan variabel independen

selain yang diuji dalam penelitian ini, seperti: kejelasan sasaran anggaran, sistem pengawasan, pengendalian internal dan sebagainya.

2. Penelitian ini hanya menggunakan 2 desa yang telah peneliti tentukan di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara yaitu Desa Simandraolo dan Desa Hilinamazihono, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti seluruh desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara agar penelitian dapat menggambarkan secara umum akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 9 (3).
- Aulia, P. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*. 1 (1).
- Arifiyanto, D. F., dan Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 2 (3). 481-493.
- Astini, Y. (2019). Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ilmiah Valid*. 16 (1). 29-47.
- Atiningsih, S., dan Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. 10 (1).
- Aziiz, M. N., dan Prastiti, S.D. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 280-344.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*. 13 (2). 193-211.
- Erlina. (2011). *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 3 (7).
- Ferina, I. S., Burhanuddin, dan Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. 14 (3). 321-336.

- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2020. 25 Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis (Untuk Landasan Teori Skripsi, Tesis, Dan Disertasi). Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul dan Muhamad Ikbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani*. 7 (2). 33-46.
- Kim, S., & Schachter, H. L. (2013). Citizen participation in the budget process and local government accountability. *Public Performance & Management Review*, 36(3), 456–471.
- Kusumastuti, R. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Pada SMA di Kota Semarang). *Jurnal Cakrawala Akuntansi*. 6 (1). 59-78.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. 8 (2), 106–11.
- Mahsun, Mohamad. 2013, Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Makalalag, A. J. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*. 8 (1). 149-158.
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta.
- Medianti, Larastika. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bintan). *JOM FEB*. Vol 1.
- Mudrosatun, N. I., (2017) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa di Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Muslimin, Mappamiring, dan St. Nurmaeta. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas jurnal ilmu pemerintahan*. Vol II.
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nuzula, T.T. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat). Skripsi. Universitas Jenderal Achmad Yani. Cimahi.
- Prabawa, Chandra Kusuma. 2016. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
- Perdana, Khaeril. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah.
- Putri, Rita D. (2018). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemda (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Solok) Jurnal. Solok : Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Riantiarno, Reynaldi, and Nur Azlina. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). PEKBIS. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis. Vol. 3 (03), 2012.
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Romantis, P. A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Jember: Skripsi Fakultas Ekonomi.
- Robbins, S. P., and Timothy A. J. 2015. Perilaku Organisasi Buku 1, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Sapartiningsih, D., Suharno., dan Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. 14 (1). 100-114.
- Sedarmayanti. (2014). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.

- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. 2017. Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. In The 6th University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang (pp. 205-210).
- Sofiyanto, M.; R.M. Mardani & M. A. Salim. 2016. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen. 6 (4), 28-38.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarjo (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo). Jurnal Tata Sejuta. 5 (2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Umaira Siti, Adnan. 2019. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI). 2 (2). 1-20.
- Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Widyatama, A., Novita, L., dan Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI). 2 (2). 1-20.
- Wulandari, I. (2020) Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Penganggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Yuesti, A., & Merawati, L. K. (2019). Akuntansi Keprilakuan. CV. Noah Aletheia.